



## Editorial

### "KAMI HADIR KEMBALI"

**S**alam Dwi Pekan! Senang sekali kami dapat menjumpai pembaca melalui Dwi Pekan. Banyak yang bertanya pada redaksi, apakah Dwi Pekan sudah di-bredel sehingga tidak terbit kembali. Bagi kami ini menjadi pernyataan yang mengejutkan, menggelitik sekaligus menyadarkan kami bahwa ternyata pembaca masih membutuhkan Dwi Pekan.

Dwi Pekan memang sempat vakum di bulan April sampai pertengahan Mei lalu. Namun demikian, kevakuman itu bukan berarti kami berhenti berkarya. Kami mencoba untuk menghadirkan Tabloid Peduli. Terbatasnya sumber daya manusia dan piranti membuat kami terpaksa 'mengistirahatkan' Dwi Pekan sementara waktu.

Keterbatasan piranti ini membuat kami harus 'bolak-balik' ke percetakan karena terdapat bad sector dalam disket yang kami bawa sehingga file tidak bisa dibuka.

Bagaimanapun kami menyadari masih banyaknya kekurangan Tabloid Peduli di sana-sini pada edisi percobaan. Namun kami berusaha semaksimal mungkin pada edisi perdana nanti, untuk menyuguhkan sesuatu yang spesial.

Sekarang apa misi Tabloid Peduli dan apa bedanya dengan Dwi Pekan? Tentu pelbagai pertanyaan muncul memenuhi benak pembaca. Semua itu akan dijawab

Bersambung ke hal. 2 kolom 1

### Seputar Pemantauan Pemilu UK Petra

Hal. 2-3



### Gebyar Seni Budaya UK Petra Berbeda dalam Seni, Bersatu dalam Budaya

Hal. 10

## DAFTAR ISI

Forum Komunikasi Tertulis.....	hal. 2
Kritik - A.....	hal. 4
Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia.....	hal. 5-7
Agenda dan Seputar Kampus.....	hal. 8

DWI PEKAN  
UNIVERSITAS KRISTEN PETRA

• Pelindung : Rektor UK Petra • Penanggungjawab : Kepala Unit Humas dan Informasi Studi

• Staf Redaksi : Ellen Ruth P., Daniel Inta Lioner, Dani • Layout : Roy Otniel

• Alamat kontak : Ruang Humas Gedung D lantai 1, Jl.Siwalankerto 121-131, Surabaya 60236, Telp. (031) 8494830-1, 8439040

Fax. (031) 8436418, 8492562 • Homepage Internet : <http://www.petra.ac.id/dwi pekan/index.htm> • E-mail : [info@petra.ac.id](mailto:info@petra.ac.id)

Untuk Sivitas Akademika UK Petra

# Sedikit Tentang Tugas Pemantau Pemilu UK Petra

Sejak proses reformasi yang dimotori mahasiswa bergulir, peran mahasiswa dalam menciptakan "Indonesia Baru" begitu kuat dan seolah-olah mengalir terus. Menindaklanjuti apa yang telah terjadi, para rektor perguruan tinggi se-Indonesia bertemu di ITB dan membentuk suatu wadah yang disebut sebagai forum rektor. Forum Rektor memiliki tugas untuk memantau jalannya pemilihan umum, yang berlangsung pada awal Juni nanti.

UK Petra sebagai salah satu perguruan tinggi yang peduli akan nasib bangsa, turut serta dalam kegiatan forum rektor yang disponsori oleh UNDP dan USA Aid ini. Dalam proses kegiatan ini UK Petra mendapat jatah untuk melaksanakan pemantauan terbatas (*limited monitoring*), yaitu memantau tepat pada hari H. Karena itu beberapa minggu yang lalu kegiatan perekrutan dan pelatihan relawan tampak meng-hiasi kampus UK Petra. Mulai dari kuliah peduli bangsa yang sudah dilaksanakan awal-awal semester genap lalu hingga pelatihan bagi relawan lapangan dan jaringan komputer.

Pada awalnya perekrutan relawan sedikit menemui hambatan. Dalam briefing relawan pemantau pemilu di Ruang Konferensi IV beberapa waktu yang lalu, Drs. Daniel Rindingpadang selaku koordinator pemantau pemilu UK Petra yang juga koordinator Subsimplur Surabaya Pusat dan Selatan, me-

ngatakan bahwa jumlah relawan yang dibutuhkan adalah sekitar 500 orang, tetapi yang tersedia saat itu baru setengahnya. Namun sejak dibukanya kembali kesempatan mendaftar sebagai relawan, target tersebut telah terpenuhi. Bahkan menurut Stephen di bagian Pusat Informasi Pemantau Pemilu UK Petra, jumlah total relawan yang terdaftar sekitar 600 orang, yang berarti telah melampaui jumlah yang dibutuhkan.

Dalam kegiatan memantau pemilu ini sendiri, UK Petra terpilih menjadi koordinator Subsimplur Dati II Surabaya Pusat dan Selatan. Dan jangkauan wilayah pemantauannya meliputi seluruh TPS di Kecamatan Wonocolo, Kecamatan Jambangan, dan sebagian di Kelurahan Wiyung serta Kelurahan Kelumprik. Sebagai informasi, di Kecamatan Jamabangan saja terdapat 54 tempat pemungutan suara (TPS). Untuk daerah Surabaya sendiri ada empat Subsimplur lainnya yang dikoordinator oleh perguruan tinggi lainnya yaitu Ubhara, Universitas Widya Mandala, Stieus, dan Universitas Wijaya Kusuma.

Mengenai operasionalnya yang akan berjalan pada 7 Juni nanti, para relawan pemantau akan dibagi menjadi dua bagian besar. Untuk relawan lapangan akan bekerja pada hari-H, sedangkan relawan jaringan akan bekerja mulai H plus 1 sampai H plus 3. Relawan lapangan sendiri akan dibagi lagi menjadi per 2 orang untuk tiap tempat pemungutan

suara (TPS). Tugas relawan lapangan adalah memantau proses pemungutan suara di TPS yang dipantaunya, dan mencatatnya dalam sebuah formulir pantauan. Contohnya seperti mencatat kondisi lingkungan TPS, kesiapan dan kelengkapan panitia dan petugas pelaksanaan, mengamati kertas dan kotak suara, serta banyak lainnya. Data-data dari formulir pantauan yang diantaranya juga berupa hasil pemungutan suara, inilah yang akan diolah dan dimasukkan oleh relawan entry data. Di Jawa Timur ini pusat pengolahan data pemantau pemilu Forum Rektor dipusatkan pada 3 Perguruan Tinggi yaitu UK Petra, Ubaya dan STTS. Setelah data yang ada selesai diolah, data akan langsung dikirim ke pusat yaitu di ITB.

Begitulah kerja yang akan dilakukan oleh para relawan pemantau pemilu nanti. Dan apabila Anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang keterlibatan UK Petra dalam memantau pemilu ini termasuk struktur organisasinya dan segala macam mengenai usaha untuk menciptakan Pemilu 99 yang jujur, dapat Anda lihat di

<http://www.pemilu99.petra.ac.id>.

Serta bila Anda ingin mengirimkan saran, kritik maupun dukungan dapat Anda layangkan melalui email

[pemilu99@petra.ac.id](mailto:pemilu99@petra.ac.id).

(103g)

## "Kami...."

sambungan dari hal. 1

pada acara "Jumpa Pembaca Dwi Pekan" yang akan diadakan dalam waktu dekat.

Pastikan Anda menghadirinya demi kemajuan dan kepuasan kita bersama. Acara ini terbuka untuk pembaca. Dalam forum ini pembaca bisa berdiskusi dan memberikan saran dan kritik konstruktif bagi Dwi Pekan.

Secuil informasi dari kami, Tabloid Peduli akan hadir rutin sebulan sekali mulai September 1999, sementara Dwi Pekan tetap terbit 2 minggu sekali di Senin kedua dan Senin keempat setiap bulannya. Sedikit demi sedikit, Dwi Pekan akan mengalami perubahan isi.

Redaksi

## Forum Komunikasi Tertulis

### KTM

Dengan surat ini saya mengajukan komplain mengenai KTM, sudah lama saya tidak bisa menggunakan KTM saya melalui komputer yang tersedia di Petra. Ini dikarenakan bar code yang ada di balik KTM saya miring, sehingga komputer sulit mendeteksi. Kemudian saya tanya di BAAK, BAAK hanya menjawab, "Ya, coba saja lagi." Saya sudah coba berkali-kali bahkan saya minta tolong teman saya ternyata tidak bisa. Masa saya harus bayar uang lagi untuk bikin KTM!!! Padahal itu kan bukan kesalahan saya.

Dian Prihandoko  
31498325

### Selamat Terbitnya TABLOID yang baru.

Saya punya usul mungkin berguna:

1. Artikel yang dimuat yang berbau reformasi birokrasi di UKP.
2. Banyak hiburannya dong.
3. Cepat menampilkan berita yang lagi hangatnya.
4. Banyakin foto yang berwarna.
5. Terbit 1 minggu sekali.
6. Perbanyak artikel tentang kemahasiswaan ex: kegiatan SMU, dan lain-lain.

Bersambung ke hal. 12 kolom 2

# Partisipasi UK Petra Pada Pemantauan Pemilu 1999

1. Salah satu hasil pertemuan Rektor tanggal 6 Nopember 1998 di Bandung, adalah Perguruan Tinggi akan berpartisipasi dalam Pemantauan Pemilu.
2. Hasil pertemuan Rektor yang diselenggarakan di Denpasar pada 12-14 Februari 1999 adalah:
  - a. Perangkat Forum Rektor
  - b. Pemantauan Pemilu
3. Pemantauan Pemilu yang bersifat independen, sukarela, terbuka bagi Perguruan Tinggi yang ingin bergabung.
4. Disepakati untuk membentuk jaringan Perguruan Tinggi untuk Pemantauan Pemilu dan khusus untuk Wilayah Jawa Timur dikoordinir oleh Universitas Surabaya.
5. Universitas Kristen Petra ikut bergabung dalam Forum Rektor di dalam jaringan Perguruan Tinggi untuk Pemantauan Pemilu dan disepakati menjadi Koordinator Sub. Wilayah/Rayon IV sesuai dengan mekanisme kerja Pembantu Rektor III di Jawa Timur.
6. Universitas Kristen Petra telah menetapkan Drs. Daniel Rindingpadang sebagai koordinator Pemantauan Pemilu UK Petra dan sekaligus sebagai Koordinator Sub. Wilayah IV.
7. Pemantauan Pemilu dikategorikan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:
  - a. Pemantauan Pemilu dalam waktu 6 (enam) bulan yang meliputi tahapan:
    - Pendaftaran
    - Kampanye
    - Pemungutan Suara
    - Perhitungan Suara
  - b. Pemantauan Pemilu dalam waktu 3 (tiga) hari yang meliputi tahapan pemungutan suara.
8. Dibutuhkan relawan dalam warga kampus yang terdiri dari mahasiswa, dosen, dan karyawan administrasi untuk secara sukarela ikut dalam tugas sebagai Pemantau Pemilu.
9. Kriteria sebagai relawan tercantum dalam "code of conduct" yang antara lain yang ditekankan pada:
  - Sukarela
  - Non partisan
  - Jujur
  - Bertanggung jawab
10. Tugas secara umum Pemantau Pemilu adalah mencatat segala sesuatu yang terjadi selama proses tahapan Pemilu berlangsung.
11. Tugas secara mendetail belum dapat disampaikan karena masih ada pertemuan-pertemuan yang akan membahas hal ini, tetapi yang pasti adalah akan diberikan pelatihan-pelatihan yang terkait dengan tugas tersebut.

(001)

## Code Of Conduct Komite Independen Pemilu

Setiap Pemantau harus memiliki sikap:

1. Independen yang mengandung arti tidak terikat dengan suatu kepentingan politik tertentu.
2. Netral yang mengandung arti tidak berpihak pada suatu organisasi politik peserta pemilu tertentu.
3. Tidak menjadi pengurus/anggota organisasi peserta pemilu.
4. Tidak menerima dana atau sarana dari organisasi peserta pemilu.
5. Menghormati hak asasi manusia.
6. Suka rela menjadi pemantau, akan tetapi bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang dilakukannya.
7. Menjalankan peran sebagai "moral force" yang dapat mendorong agar pemilu berjalan secara Luber dan Jurdil.
8. Bersedia disumpah atau mengucapkan janji bahwa akan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
9. Jujur, bersih, transparan, objektif serta bertanggung jawab terhadap masyarakat.

## HuMoR

### Sulap Menyulap

Berikut ini petikan wawancara fiktif yang dilakukan wartawan Parhumi (Partai Humor Indonesia) dengan Pesulap kondang David Copperfield.

Parhumi : Parhumi mengucapkan selamat atas julukan 'Pesulap Kondang' dunia yang Anda terima dari seluruh penggemar Anda diseluruh dunia

David : (Sambil tersenyum...) ah... Anda jangan merendeh.... Anda dari Indonesia kan ?

Parhumi : (mengangguk)

David : Saya masih harus berguru kepada teman-2 Anda di Indonesia

Parhumi : Maksud Anda ???

David : yakh, seperti Anda ketahui, saya hanya bisa menyulap dan membuat orang hilang beberapa menit saja, tapi rekan Anda di Indonesia bisa melakukan lebih dari saya. Saya harus menyulap dulu, baru bisa membuat orang hilang, tapi di Indonesia rekan Anda bisa membuat orang hilang, setelah itu baru menyulap....

Parhumi : Ah... Bung David bisa aja nih.... (senyum bangga...)

Parhumi : Pertanyaan terakhir Bung David.... Selain Claudia, siapakah orang yang anda kagumi dan ingin Anda temui saat ini

David : Eddy Tanzil.....

Parhumi : Mengapa???

David : Saya ingin bertanya, bagaimana cara rekan Anda menyulapnya sampai bisa menghilangkan demikian lama?!

Parhumi : ???????

# Kritik-A

Oleh : David Holdrich Nahason (21494101)

"Sial, mesti begadang lagi aku malam ini!" umpat Joko Johannes Chan yang baru saja keluar asistensi dari ruangan dingin seorang dosen.

"Sial kenapa, hai Joko?" tanya Pontak Marhaines yang sudah dari tadi dengan setia menunggunya. Joko Johannes Chan pun bersiap-siap untuk berbicara meledak-ledak! Ya, Joko Johannes Chan memang seorang pembicara yang bersemangat dan meledak-ledak. Ia adalah mahasiswa Jurusan Teknik Kritik Arsitektur (hingga abad 20 para Arsitek mulai kebingungan merancang model bangunan baru, sehingga abad 21 para Arsitek mulai mengkritisi model yang lalu).

Joko Johannes Chan sebenarnya adalah mahasiswa kelahiran pulau Rote. Diberi nama Johannes menandakan keyakinan papanya sebagai orang Kristen terhadap Johannes. Ditambah Joko di depan Johannes karena namanya yakin bahwa nama Joko lebih bisa beradaptasi dan diterima di Jawa. Dibubuhi embel-embel Chan bukan karena marganya, tapi karena opanya sudah sejak lama menginginkan seorang keturunannya kuliah di Universitas Patera.

Joko segera saja menyeret Pontak ke markas Himpunan Mahasiswa Kritik-A yang terletak di pojok, 'nyelempt', sempit dan terkenal panas. Belum lagi Pontak menaruh pantatnya di kursi kaleng yang hanya ada satu-satunya di ruang itu, Joko sudah mulai mengungkapkan kesialannya dengan bersemangat dan meledak-ledak.

"Dua malam aku tidak tidur, Tak!" ia memang sekarang lagi pantas menyandang nama Chan dengan matanya yang tampak merah dan menyipit, yang tidak bisa ditutupi dengan semangat dan suaranya yang meledak-ledak. Pontak yang sangat senang bila mendengar Joko meledak-ledak berusaha memancing pembicaraan.

"Ngapain aja kamu dua malam tidak tidur?"

"Begini, aku kan dapat tugas merancang kritik untuk bangunan kampus. Malam pertama aku mencari ide kritik. Setelah berjam-jam aku melamun akhirnya aku menemukan ide itu."

"Apa ide kritikmu itu?"

"Aku menemukan ide kritik terhadap kampus kita ini. Kamu 'inga-inga' sewaktu Rektor kita baru menjabat, beliau bilang apa?"

"Oh, tentu aku tidak pernah lupa, aku masih 'inga', kira-kira intinya beliau bilang bahwa Mahasiswa adalah inti

## "Mahasiswa adalah inti dari sebuah universitas. Apa artinya sebuah universitas tanpa Mahasiswa?"

dari sebuah universitas. Apa artinya sebuah universitas tanpa Mahasiswa? Mahasiswa adalah yang spesial, segenap Dosen dan Karyawan dituntut untuk memiliki dedikasi dan menghayati jiwa seorang Pelayan yang utamanya melayani kebutuhan Mahasiswa di kampus ini."

"Betul, diam-diam ternyata kamu lebih ingat dan menghayati apa yang diucapkan orang lain, hebat juga kamu, Tak!" ungkap Joko dengan nada salut.

"Terus apa hubungannya dengan ide kritikmu?" pancing Pontak tanpa terpengaruh dengan pujian Joko.

"Dari segi penempatan dan kondisi, ruangan aktivis kemahasiswaan adalah yang paling memprihatinkan di kampus ini. Bayangkan sudah puluhan tahun tata letak dan fasilitas kantor-kantor Himpunan dan Senat Mahasiswa tidak banyak mengalami perubahan. Yang mungkin selalu pasti berubah adalah penghuninya. Dalam hal ini saja dari kaca mata ilmu Kritik Arsitektur tidak menggambarkan bahwa Mahasiswa itu menjadi makhluk yang khusus dan berharga di kampus

ini. Kalau bermanfaat mungkin iya. bermanfaat SPP-nya untuk menambah kesejukan dan kenyamanan ruangan pimpinan, dosen dan karyawan, bermanfaat tenaganya untuk mengharumkan almamater. Singkat kata kondisi ini dalam ilmu Kritik Arsitektur dinamakan Eksploitasi Dekonstruksi terhadap kenyataan."

"Itu masih bicara tentang tata letak dan kondisi, belum bicara masalah fasilitas dimana tidak ada komputer, sambungan telepon atau yang lebih sederhana kursi yang saya duduki ini pun kursi kaleng, bukan sofa yang empuk!" timpal Pontak lagi.

"Ahk...saya tidak mau bicara yang di luar konteks keilmuan yang saya pelajari. Kalau kita kembali ke masalah tata letak tadi, dari ide kritik itu, saya akhirnya merancang sebuah bangunan kampus dimana sebagai pusatnya adalah graha mahasiswa berlantai empat ke bawah tanah," ungkap Joko coba mengarahkan kembali pembicaraan.

"Ke bawah tanah? Seperti basement maksudmu?" tanya Pontak sedikit bingung.

"Betul!" jawab Joko dengan semangat empat lima

"Terus, konsepmu tentang bangunan itu?"

"Ya, jelas konsepnya bahwa bangunan Graha Mahasiswa ini saya rancang terletak di tengah-tengah lingkungan kampus, ini untuk menggambarkan agar sejalan dengan pernyataan bahwa mahasiswa sebagai pusat. Selanjutnya bangunannya saya rancang kg dalam tanah untuk menggambarkan bahwa

kegiatan perjuangan mahasiswa itu adalah meletakkan pondasi yang mengawali perubahan (pembangunan selanjutnya biasanya diserobot oleh pihak lain yang oportunistis dan punya banyak uang untuk nyogok. Mungkin inilah takdir mahasiswa, menuai tapi tidak memakan buahnya), yang pada saat tertentu terkadang bersifat underground. Kenapa tidak ke atas? Kalau ke atas kesannya menonjol dan menjadi pusat perhatian banyak orang. Iya kalau yang di sebelah-sebelahnya juga menjulang, kan masih banyak yang gubuk-gubuk, yang kalau hujan bocor dan kalau siang, kepanasan (tidak ada AC). Sedangkan ruangan kuliah dan ruangan perkantoran dosen dan karyawan, saya rancang mengelilinginya untuk menggambarkan bahwa mereka adalah pe-



Bersambung ke hal. 9 kolom 1

# BUKTI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Menurut Keputusan Presiden No. 56 Th. 1996  
Cukup dengan KTP atau KK atau Akte Kelahiran

Oleh: J. Hendy Tedjonagoro, S.H.

**U**U No. 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia pada pokoknya mengatur 2 hal penting, yaitu:

1. Memperoleh kewarganegaraan R.I.
2. Kehilangan kewarganegaraan R.I.

Menurut Undang-Undang tersebut ini kewarganegaraan R.I. dapat diperoleh: karena kelahiran, pengangkatan anak, dikabulkannya permohonan, pewarganegaraan atau naturalisasi, karena atau sebagai akibat suatu perkawinan, karena turut ayah atau ibunya, karena pernyataan mengikuti status kewarganegaraan suaminya dalam waktu 1 tahun setelah perkawinannya.

Selanjutnya dalam UU ini juga ditegaskan ada beberapa hal yang menyebabkan seorang warga negara Republik Indonesia akan kehilangan kewarganegaraannya, yaitu:

- Jika orang tersebut memperoleh kewarganegaraan baru dari negara lain atas kehendaknya sendiri atau karena ingin suatu kewarganegaraan saja sedangkan ia tidak bertempat tinggal di Indonesia atau karena perbuatan-perbuatan yang dapat menunjukkan bahwa orang tersebut tidak atau kurang menghargai Kewarganegaraan Republik Indonesia (pasal 17).

Bagi WNI yang bertempat tinggal di luar negeri untuk setiap kontak dengan Perwakilan Republik Indonesia di sana kecuali apabila WNI itu menjalankan tugas dinas negara Republik Indonesia.

- Jika mengikuti kewarganegaraan orang asing karena perkawinan yang sah: kecuali apabila ia ingin tetap mempertahankan kewarganegaraan asalnya (pasal 7-8).

Catatan:

Ada asas kesatuan kewarganegaraan antara mempelai (suami/istri) ini ternyata dalam hal memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia (Pasal 9-10).

- Karena kesetiaan terhadap Negara lain seperti ikut dinas militer tanpa izin asalnya (Republik Indonesia) atau membela kepentingan negara asing dan bersumpah setia pada negara asing atau turut pemilu negara asing atau punya paspor negara asing dan seterusnya.

## SURAT BUKTI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Pada 14-03-1978 Menteri Kehakiman Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Kehakiman No. JB 3/4/12 tentang Surat Bukti Kewarganegaraan R.I. (dikenal dengan SBKRI).

Peraturan ini merupakan pelaksanaan Keppres No. 52/1977 tentang Pendaftaran Penduduk. Dengan dikeluarkannya Peraturan ini maka ketentuan mengenai pengeluaran Surat Keterangan Kewarganegaraan Republik Indonesia (Dikenal dengan sebutan SBKRI) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Perlu diketahui bahwa orang-orang yang memperoleh kewarganegaraan secara pasif tanpa berbuat apa-apa tidak pernah mempunyai bukti kewarganegaraan Republik Indonesianya jika mereka tidak pernah meminta pada Pengadilan Negeri setempat atau Pihak Yang Berwenang. Lain hanya dengan mereka yang secara aktif memperoleh kewarganegaraannya yaitu melakukan tindakan hukum tertentu seperti: mohon bukti kewarganegaraannya pada instansi yang berwenang.

Kemudian instansi tersebut mengeluarkan surat keterangan yang dapat dipakai sebagai Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia seperti: Surat Catatan dari Pengadilan Negeri tersebut sebagai Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia yang menerangkan bahwa wanita itu telah menjadi warga negara Indonesia karena menyatakan keterangan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia mengikuti kewarganegaraan suaminya.

• Jika kita lihat Surat Edaran Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. JB 3/166/22 tanggal 30 September 1958 tentang memperoleh/kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia yaitu dengan Pernyataan Surat Catatan Pernyataan Keterangan

(Formulir I, II, III, IV, V, VI) Surat-Surat Bukti Kewarganegaraan tersebut harus bertanggung sebelum 1 Agustus 1958, saat UU No. 62 tahun 1958 mulai berlaku:

Catatan:

Bagi mereka yang menyatakan secara lisan memperoleh formulir 1A s.d. VIA sedangkan yang secara tertulis memperoleh formulir A s.d. VI.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehakiman ini, setiap warga negara Indonesia yang perlu membuktikan kewarganegaraannya dapat mengajukan permohonan kepada Menteri Kehakiman untuk memperoleh SBKRI. Permohonan ini diajukan melalui Pengadilan Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia tempat tinggal pemohon. Permohonan harus ditulis dalam bahasa Indonesia dan dilampiri dengan surat-surat yang menunjukkan bahwa pemohon adalah warga negara Indonesia. Pengadilan Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia ini kemudian memeriksa pemenuhan syarat yang diperlukan untuk kemudian meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri Kehakiman c.q. Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan. Pemohon yang telah memenuhi persyaratan diberi SBKRI.

SBKRI yang diperoleh berdasarkan peraturan ini tidak mengurangi kekuatan pembuktian surat bukti kewarganegaraan yang telah diberikan kepada orang yang telah menjadi Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 62/1958 (tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia) jo. Undang-Undang No. 3/1976 (tentang Perubahan Pasal 18 UU No. 62/1958) dan Undang-Undang No. 4/1969 (tentang Tidak Berlakunya Undang-Undang No. 2/1958 tentang Perjanjian Persetujuan antara Republik Indonesia dan RRC mengenai soal dwi kewarganegaraan).

Disamping ketentuan umum tentang SBKRI tersebut, ada pula ketentuan khusus yang diatur dalam Instruksi Presiden No. 2/1980 yang menetapkan bahwa Menteri Kehakiman dan Menteri Dalam Negeri melaksanakan pemberian SBKRI kepada warga negara Indonesia keturunan asing dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Sedangkan tata cara pelaksanaannya diatur bersama

Bersambung ke hal. 6

## BUKTI KEWARGANEGARAAN....

*sambungan dari hal. 5*

oleh kedua menteri itu dengan pokok-pokok sebagai berikut:

- a. Pemberian SBKRI dilakukan oleh Bupati/Kepala Daerah Tingkat II atau pejabat yang ditunjukkan atas kuasa Menteri Kehakiman.
- b. Pelaksanaan pemberian SBKRI harus selesai selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 1980.

Guna melaksanakan Instruksi Presiden tersebut di atas, pada tanggal 20 Maret 1980 muncul Surat Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Dalam Negeri No. M.01-UM.0903-80 No. 42/1980 tentang Pelaksanaan Pemberian Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia. Surat Keputusan bersama ini dapat diberikan kepada warga negara Indonesia keturunan asing yang telah dewasa, namun tidak memiliki bukti kewarganegaraan, dengan syarat-syarat:

- a. Dilahirkan dan dibesarkan di Indonesia
- b. Sehari-hari hidup sebagai warga masyarakat Indonesia
- c. Dapat berbahasa Indonesia atau bahasa daerah
- d. Tidak pernah menolak kebangsaan Indonesia berdasarkan PPPWN
- e. Tidak terdapat tanda-tanda sebagai orang asing dan tidak pernah memperoleh *Exit-Permit Only* (EPO).
- f. Bertempat tinggal di Propinsi Sumatera Utara, Riau, Propinsi Kalimantan Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung, Kotamadya Pangkal Pinang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kotamadya Bogor, Kabupaten Karawang.

SBKRI ini dapat diberikan kepada mereka yang pernah turut serta dalam pemilihan umum untuk Dewan Perwakilan Rakyat ataupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Wewenang pemberian SBKRI ini dilimpahkan oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II kepada Camat. Camat menandatangani SBKRI atas kuasa Menteri Kehakiman. Berdasarkan petunjuk pelaksanaan yang terlampir dalam surat keputusan bersama itu diatur prosedur pemberian SBKRI sebagai berikut:

Setiap orang yang akan diberi SBKRI wajib mengisi surat pernyataan yang tersedia di kantor kecamatan. Mengenai pembuktian akan pemenuhan persyaratan yang diperlukan, dapat dilakukan dengan surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa. Pemberian SBKRI harus dicatat dalam Buku Register Pengeluaran SBKRI. Buku Register ini ditutup pada tanggal 30 Juni 1980 dikirim ke Departemen Kehakiman selambat-lambatnya pada tanggal 5 Juli 1980.

Surat Edaran Menteri Kehakiman No. AS-UM.09.03.01 tanggal 16 Juni, 1980, menyata-

kan bahwa khusus dalam rangka pembuatan paspor dan pendidikan, pembuktian secara terpisah dengan SBKRI tidak diperlukan lagi.

### SURAT BUKTI KEWARGANEGARAAN R.I. SEJAK 1983

Pemberian SBKRI eks Instruksi Presiden No. 2/1980 telah selesai dilaksanakan pada 17 Agustus 1980, meliputi sebagian wilayah Republik Indonesia seperti yang telah disebut. Namun jika pemberian SBKRI eks Instruksi Presiden No. 2/1980 akan dilanjutkan ke daerah lain, sementara ada pemberian SBKRI eks Persatuan Menteri Kehakiman No. JB 3/4/12 tahun 1978, terdapat dua jalur pemberian SBKRI yang akan menimbulkan permasalahan.

Oleh karena itu, pada 25 April 1983 terbit Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.01-HL.04.02, tanggal 7 Juli 1983. Keduanya dimaksudkan sebagai landasan hukum pemberian SBKRI bagi mereka yang belum sempat memperolehnya berdasarkan Instruksi Presiden No. 2/1980, dan untuk menyatukan penanganannya oleh instansi berwenang.

Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.01-HL.04.02 mengatur tentang Surat (Pernyataan) Keterangan Kewarganegaraan Berdasarkan Perjanjian Dwi-Kewarganegaraan RI-RRC dan Pemberian Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia. Sedangkan ketentuan pelaksanaannya diuraikan dalam Surat Edaran Menteri Kehakiman No. C-HL.03.10.1.

Setiap surat pernyataan keterangan melepaskan kewarganegaraan RRC untuk tetap menjadi warga negara Indonesia berdasarkan Perjanjian Dwi-Kewarganegaraan RI-RRC (yaitu Formulir I/A sampai dengan VI/VIA, C dan D) yang telah dikeluarkan/disyahkan oleh pejabat berwenang dan menurut tata cara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adalah sah secara hukum. Kesalahan yang bersifat administratif maupun kemungkinan adanya kekeliruan penafsiran yuridis tidak mengurangi keabsahan surat pernyataan tersebut. Sedangkan yang berwenang untuk menentukan sahnya suatu surat pernyataan adalah Menteri Kehakiman atau Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan atas nama Menteri Kehakiman.

Pemberian SBKRI kepada pemegang surat pernyataan tersebut dan keturunannya berdasarkan permohonan mereka adalah sah apabila dilaksanakan menurut ketentuan yang berlaku. Tetapi disamping hal-hal yang diatur dalam Peraturan Menteri Kehakiman No. JB.3/4/12 jo, Surat Edaran Menteri

Kehakiman No. JHB.3/31/3, tahun 1978, SBKRI juga dapat diberikan kepada orang keturunan asing yang berdasarkan pasal 1 UU No. 62/1958 sudah menjadi warga negara Indonesia namun saat ini tidak memiliki bukti kewarganegaraan. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Kehakiman kepada Ketua Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia No. C-HL.0310-1, tanggal dan Juli 1983, mereka harus memenuhi syarat-syarat.

- a. Dilahirkan dan dibesarkan di Indonesia, dibuktikan dengan petikan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga.
- b. Sehari-hari hidup sebagai warga masyarakat Indonesia, dan dapat berbahasa Indonesia. Untuk membuktikan ini, Pengadilan Negeri menguji pemohon dalam hal kecakapan berbahasa Indonesia dan Pengetahuan Moral Pancasila. Berita Acara hasil ujian dibuat menurut contoh pada Lampiran I.
- c. Tidak pernah menolak/ditolak/ikut dalam penolakan kebangsaan Indonesia pada masa opsi/repudiiasi antara tanggal 27 Desember 1949 sampai 27 Desember 1951, dibuktikan dengan surat pernyataan dari bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup yang dibuat menurut contoh pada lampiran II,
- d. Tidak terdapat petunjuk-petunjuk sebagai orang asing, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kantor Imigrasi setempat dan dibuat menurut contoh pada lampiran III.

Tata cara pemberian SBKRI ini selanjutnya adalah sama dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kehakiman No. JB.3/4/12 tahun 1978, tentang Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia. Artinya dengan berlakunya Keputusan Menteri Kehakiman beserta surat edarannya pada tahun 1983 ini pemberian SBKRI hanya dimohonkan kepada dan diberikan oleh Menteri Kehakiman melalui Pengadilan Negeri (bagi mereka yang bertempat tinggal di Indonesia) atau Perwakilan Republik Indonesia (bagi mereka yang bertempat tinggal di luar negeri).

Surat Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 10 Juli 1992, No. M.02-HL.04.10 mengatur bahwa anak warga negara Indonesia keturunan asing yang orangtuanya memegang bukti kewarganegaraan Indonesia tidak diwajibkan lagi memiliki Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI). Mereka dapat membuktikan kewarganegaraan Indonesianya dengan (petikan) Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Secara substansial Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.02/HL.04.10 ini dapat dikatakan sebagai koreksi atas pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Kehakiman

No. M.01.HL.04.02 tahun 1983 yaitu Surat Edaran Menteri Kehakiman No. C-HL.03.10.01 tanggal 7 Juli 1983, karena pada hakekatnya Akta Kelahiran seorang anak keturunan warga negara Republik Indonesia telah merupakan bukti kewarganegaraan Indonesia bagi yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan asas *ius sanguinis* yang dianut dalam Undang-Undang No. 62/1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, khususnya pasal 1.

Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.02.HL.04.10 tahun 1992, menimbulkan kejangalan yuridis yang baru, karena Kartu Tanda Penduduk (KTP) dapat dijadikan bukti kewarganegaraan Indonesia. Masalahnya terletak pada hakekat Kartu Tanda Penduduk itu sendiri. Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan Camat adalah tanda kependudukan seseorang dan bukan tanda kewarganegaraan seseorang. Selain itu, Camat bukanlah instansi yang berwenang menentukan kewarganegaraan (Indonesia) seseorang. Terlebih lagi, tidak ada satu ketentuan pun, khususnya dalam Undang-Undang No. 62/1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang dapat dijadikan landasan Hukum bagi legitimasi atas Kartu Tanda Penduduk sebagai bukti kewarganegaraan Indonesia bagi pemegangnya. Namun ini merupakan suatu upaya pembaharuan Hukum Kewarganegaraan Indonesia.

### KETENTUAN-KETENTUAN MENYANGKUT MASALAH ORANG CINA DI INDONESIA

Ada empat kategori masalah yang masih belum tuntas, yaitu:

- Masalah warga negara RRC pemegang *Exit Permit Only* (EPO) sebagai akibat diberlakukannya Peraturan Presiden No. 10/1959.
- Masalah imigran gelap
- Masalah warga negara RRC yang menggunakan paspor palsu atau berada di wilayah Indonesia tanpa dokumen yang sah
- Masalah warga negara RRC yang bermukim di Indonesia dan memegang Surat Keterangan Kependudukan (SKK)

Seperti telah disinggung sebelumnya, Peraturan Presiden No. 10/1959 telah menimbulkan arus mudik para warga negara RRC ke negerinya. Tetapi ternyata kemudian banyak pemudik yang tidak terangkut, sehingga nasib mereka menjadi terkatung-katung, sebab mereka telah terlanjur melepaskan kewarganegaraan Indonesiannya. Disamping itu, rupanya banyak diantara para pemudik Cina ini yang kecewa dengan situasi RRC. Akibatnya banyak diantara mereka yang

berusaha untuk menyelundup masuk kembali ke Indonesia dengan pelbagai cara, terutama sejak membaiknya situasi politik dan ekonomi di Indonesia di bawah Orde Baru. Mereka ini yang kemudian dikenal sebagai imigran gelap.

Selain itu, dibekukannya hubungan diplomatik RI-RRC banyak warga negara RRC yang lahir dan bertempat tinggal di Indonesia, ingin menjadi warga negara Indonesia. Dalam permohonan mereka harus melampirkan *Letter of Explanation*, yang jelas tidak mungkin mereka peroleh, mengingat ditutupnya Perwakilan RRC di Indonesia. Sebagai gantinya mereka harus membuat surat pernyataan melepaskan kewarganegaraan RRC apabila memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Kebijakan Pemerintah Indonesia ini tentu saja merupakan suatu permasalahan, karena dapat saja warga RRC memper-

tanyakan keabsahan cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia itu, serta tetap menganggap mereka sebagai warga negaranya.

Berdasarkan pendataan ulang tahun 1986, terdapat 299.224 orang asing keturunan Cina yang mengaku sebagai warga negara RRC. Umumnya mereka yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia itu sudah tidak memiliki paspor RRC lagi. Selain itu terdapat pula 4.285 orang asing eks Peraturan Presiden No. 10/1959. Dari jumlah ini sebanyak 1.930 orang telah mendaftarkan diri untuk memperoleh Surat Keterangan Kependudukan (SKK), yang memberikan hak menetap di Indonesia. Sementara itu ada sekitar 3.549 orang imigran gelap yang masuk ke Indonesia (Kompas, 5 Mei 1992; Kompas, 6 Mei 1992; Forum Keadilan No. 03, 28 Mei 1992).

Tanggal 20 Januari 1992 hubungan diplomatik RI-RRC dipulihkan. Sebagai salah satu tindak lanjut adalah pencarian penyelesaian masalah orang asing keturunan Cina, yang berhasil dilaksanakan dengan ditandatanganinya *Memorandum of Understanding* antara Menteri Kehakiman Indonesia, Ismail Saleh dan Menteri Kehakiman RRC, Cai Cheng pada 4 Mei 1992 di Beijing.

Penandatangan yang didahului dengan *Senior Official Meeting* 13-16 di Jakarta itu, berhasil menyepakati satu keputusan penting, yaitu penyelesaian seluruh masalah yang berkaitan dengan warga negara RRC di Indonesia dengan ketentuan hukum Indonesia. Dengan demikian, berakhirlah ketidakpastian hukum tentang cara-cara penyelesaian sepihak dari Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah RRC atas warga negara RRC di Indonesia.

### KESIMPULAN

Konkretnya, Pemerintah RRC dengan senang hati mendukung jika warga negara RRC yang selama ini memiliki dwikewarganegaraan, dengan sukarela memilih untuk menjadi warga negara Indonesia. Begitu memilih untuk menjadi warga negara Indonesia mereka langsung kehilangan kewarganegaraan RRC-nya. Kongres Rakyat Nasional RRC pada tanggal 10 Juli 1980 telah mengesahkan Undang-Undang Kewarganegaraan RRC yang baru. Sejak saat itu, setiap orang Cina yang menetap di luar negeri dan telah menjadi warga negara di negara itu dengan pewarganegaraan atau memperoleh kewarganegaraan atas kehendaknya sendiri, akan langsung kehilangan kewarganegaraan RRC-nya. Pemerintah RRC juga tidak akan campur tangan dalam masalah hukum luar negeri. Oleh karena itu, diharapkan agar para bekas warga negara RRC yang telah menjadi warga negara Indonesia dapat hidup bermasyarakat di Indonesia.

Akhirnya, keempat masalah seperti yang telah disebutkan dari segi hukum memperoleh kejelasan:

- Para warga negara RRC eks Peraturan Presiden No. 10/1959 diakui kedudukannya sebagai warga negara RRC. Kedutaan RRC di Indonesia akan mengeluarkan paspor untuk mengganti dokumen-dokumen perjalanan yang sebelumnya telah kadaluwarsa. Pemerintah RRC setuju untuk menerima mereka yang ingin pulang ke RRC. Namun mereka masih diberi pilihan untuk tinggal di Indonesia, sekalipun paspor RRC-nya telah diberikan. Bagi mereka yang kemudian memutuskan untuk menjadi warga negara Indonesia, Pemerintah Indonesia juga akan memprosesnya sesuai dengan prosedur aturan hukum yang ada.
- Para imigran gelap yang telah masuk ke Indonesia dan telah mendapatkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, diakui sebagai warga negara RRC. Pemerintah Republik Indonesia berketetapan untuk mengembalikan mereka ke RRC.
- Pemerintah Republik Indonesia dan RRC bersikap tegas terhadap mereka warganegara RRC yang menggunakan paspor palsu.
- Para pemukim yang telah puluhan tahun tinggal di Indonesia akan diberi paspor RRC jika memiliki SKK dan mau pergi ke RRC atau boleh juga menjadi warga negara Indonesia sesuai prosedur aturan hukum yang berlaku dengan proses cepat/khusus. (Kep. Pres. No. 56-1995 tentang Bukti Kewarganegaraan RI; Inst. Pres. No. 6-1995 tentang Percepatan Penyelesaian Permohonan Pewarganegaraan RI-Kep. Pres. No. 57 tahun 1995 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pewarganegaraan R.I.).

Penulis adalah dosen luar biasa UK Petra.

# Seputar Kampus

## BENDERA FAKULTAS

Mulai tahun akademik 1999-2000 warna bendera diterbitkan sebagai berikut:

1. Fakultas Teknik (termasuk semua Jurusannya) : Merah
2. Fakultas Seni dan Desain (termasuk semua Jurusannya) : Ungu Muda
3. Fakultas Ekonomi (termasuk semua Jurusannya) : Hijau
4. Fakultas Sastra : Putih
5. Program Non Gelar (termasuk Pendi-dikan kepariwisataan, PPKAI, PBE, PPAB) : Kuning

Informasi ini disampaikan kepada sivitas untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang telah diberlakukan.

## POSKO SIAGA PEMILU

Universitas Kristen Petra telah membentuk Posko Siaga Pemilu yang bekerja di bawah pengendalian Unit Keamanan. Posko ini diadakan selama berlangsungnya kampanye hingga pelaksanaan selesainya Pemilu 1999. Posko mulai aktif pada 19 Mei 1999 bertempat di Ruang V.I.P (Entrance Hall lantai 2).

Sivitas yang ingin mengetahui tentang

kegiatan posko ini atau informasi seputar pemilu dapat menghubungi pesawat 031-8491885 ext. 1663.

## PELATIHAN PEMANTAU LAPANGAN

Panitia Forum Rektor UK Petra telah mengadakan Pelatihan Pemantau Lapangan Pemilu bagi civitas relawan di RK IV, Tower UK Petra selama 3 hari yaitu dari tanggal 24 Mei 1999 - 26 Mei 1999. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mempersiapkan para relawan lapangan agar siap pada hari-H.

## PERKULIAHAN MENJELANG DAN SETELAH PEMILU

Menyikapi kondisi dan situasi menjelang dan setelah hari H (Pemilihan Umum) serta mengacu pada hasil pertemuan antara pimpinan Universitas/Fakultas/Jurusan/Program tertanggal 11 Mei 1999, Rektor Universitas Kristen Petra menegaskan kembali bahwa perkuliahan pada semester ini tetap dilaksanakan berdasarkan Penanggalan Akademik Semester Genap 1998/1999.

Namun untuk mengantisipasi kemungkinan terganggunya kegiatan akademik, dihimbau kepada para dosen untuk memanfaatkan perkuliahan di bulan Mei 1999 (kurang lebih 3 minggu) dengan sebaik-baiknya dan memberikan tugas-tugas yang direncanakan, sehingga bilamana perlu dapat dijadikan patokan untuk evaluasi akhir.

## LARANGAN MEMAKAI SANDAL DI KAMPUS

Sehubungan dengan makin banyaknya mahasiswa yang menggunakan sandal ke kampus maka Rapat Dinas Akademik pada 13 April 1999 dan Rapat Pimpinan pada 6 Mei 1999 telah menyepakati bersama untuk memberlakukan larangan memakai sandal ke kampus.

Untuk mendukung kesepakatan ini, sivitas UK Petra diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan menyangkut diberlakukannya

larangan ini.

## STUART SCHOOL OF BUSINESS

Stuart School of Business dari Illinois Institute of Technology memberikan beasiswa berupa *tuition scholarship* (sampai dengan 50%) berdasarkan nilai GMAT yang diperoleh dan indeks prestasi sebesar 3.00 bagi mahasiswa yang ingin melanjutkan studi ke jenjang S2. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kantor Kerjasama Luar Negeri di Entrance Hall lantai dasar.

## PETRA ICE HOCKEY

Ingin bergabung dengan Petra Ice Hockey? Hubungi Kelvin di 081-2353-1218 atau Evan di 081-830-2039.

## BIBLE FUN

Pusat Kerohanian (Pusroh) telah mengadakan "Bible Fun" dalam rangkaian acara liburan sekolah putra-putri dosen/ karyawan UK Petra pada 26 Mei 1999, pukul 10.30-12.00 BBWI yang bertempat di Tower UK Petra W303. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar anak-anak mempunyai kerinduan untuk membaca Alkitab dan secara kreatif memahami Alkitab.

## DISKUSI GENDER

Telah diadakan diskusi gender mengenai kesehatan reproduksi wanita pada hari Sabtu 22 Mei 1999, pukul 10.00-12.00 BBWI yang bertempat di RK I, Tower UK Petra. Yang berkesempatan menjadi fasilitator adalah Dra. Evelylna Soetrisno, Psi.

## STUDI EKSKURSI TEKNIK INFORMATIKA

Telah diadakan studi ekskursi bagi Teknik Informatika ke PT. Telkom Surabaya pada tanggal 2 Juni 1999. Studi ini dalam pemenuhan tugas matakuliah Pengantar Manajemen untuk melihat sistem informasi dan manajemen suatu perusahaan.

## Agenda Kampus

### SEMINAR DAN PELATIHAN

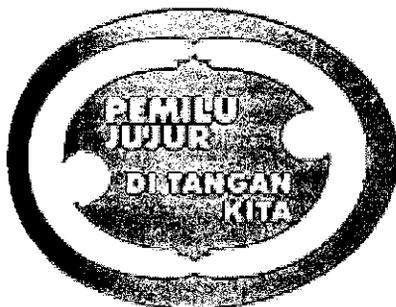
Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi bekerjasama dengan Hima Perhotelan akan mengadakan seminar dan pelatihan, dengan tema "Asian Professionals Facing the Third Millennium". Seminar akan berlangsung pada hari Jumat 18 Juni 1999 di Forum Restaurant dengan menampilkan pembicara Indayati Oetomo (Direktur John Robert Powers Surabaya) dan Team dari Bursa Efek Surabaya. Sedangkan Pelatihan akan diselenggarakan pada 18-20 Juni 1999 bertempat di Bukit Eklesia Pacet, dengan team fasilitator dari Lembaga Psikologi Mandala Yudhistira.

PEMILU JURDIL, ada di tangan  
ANDA

# DAFTAR KOLEKSI BUKU BARU PERPUSTAKAAN UK PETRA

NO.	JUDUL
1.	Analisa Anggaran Biaya Pelaksanaan
2.	<b>Auf deutsch gesagt: tutr kata Jermannya 4**</b>
3.	Buku Kenangan Wisuda Periode
4.	China: Issues and Options in Greenhouse
5.	Complete Sonnets
6.	Customer Care
7.	Fiscal Management in Russia
8.	Foreign Direct Investment and Environment.
9.	Global Climate Change
10.	Global Environmental Facility
11.	Guideline for Traffic Impact Assessment
12.	Input-output Analysis of the Public Sector
13.	Kate Chopins the Awakening
14.	Kazakstan: Transition of the State
15.	Labor Relations and Collective Bargaining
16.	Managing by Values
17.	Menguak Kecanggihan Rekayasa Konstruksi
18.	North Michigan
19.	Poems, Novels and Stories of Oscar Wilde
20.	Poverty Reduction and the World Bank
21.	Procurement and Disbursement Manual for...
22.	Protected Agriculture: A Global Review
23.	Religions in the Republic of China
24.	Rural Energy and Development
25.	Schools Count: World Bank Project Design...
26.	Supply and Demand for Finance of Small Ent..
27.	Techniques and Resources in Teaching Gram..
28.	The Conditions of Young Children in sub- Sa..
29.	The East Asia Miracle and Information Tech..
30.	Toward an Environmental Strategy for Asia
31.	Trends in Developing Economies
32.	Understanding Poverty in Poland
33.	Uniform System of Accounts for the Lodg...
34.	Valuing Tropical Forests Methodology and...
35.	What We Know about Acquisition of Adult

NO.	JUDUL
36.	Emerging Patterns of Innovation
37.	Electromagnetics with Applications
37.	Mesin Pencabut Bulu Unggas
38.	Basic Financial Management
39.	Costs, Benefits, and Farmer Adobtion of Agro..
40.	Discovery Psychology: A Guide to Act...
41.	Environmental and Economic Issues in Fores...
42.	Environmental and Health in Central and East...
43.	Erotic Works of D.H. Lawrence
44.	Essential Business Tactics for the Net
45.	From Macroeconomic Correction to Public...
46.	Hospitality Reseach Journal
47.	Hospitality Research Journal
48.	Hospitality Research Journal
49.	Hospitality Research Journal
50.	Hotel, Hospitality and Tourism Law
51.	Industrial Restructuring World Bank Experi
52.	Institutional Change and Effective Financing...
53.	Introduction to Business Statistics
54.	Journal Hospitality and Tourism Research
55.	Management Accounting
56.	Medicinal Plants
57.	Organizational Behaviour: Experiences & Cas..
58.	Overcoming Agricultural Pollution of Water
59.	Pengantar Perencanaan Regional
60.	Pokok-pokok Pikiran YLBHI tentang Refor...
61.	Policies Affecting Fertility and Contra...
62.	Poverty Reduction in South Asia
63.	Practical Criticism: a Method of Approach
64.	Reading Skills: Improving Speed and Compre...
65.	Risk Management in Developing Countries
66.	Sustainability and the Wealth of Nations
67.	Sustinable Settlement and Development of the...
68.	The World Bank and Irrigation
69.	The World Bank's Role in Human Resource...



**Forum  
Rektor**

Jangan GOLPUT !!!

**Coblos, sesuai  
hati nurani**



# Berbeda dalam Seni

## Bersatu

## Budaya

Pada tanggal 16 - 22 Mei 1999 yang lalu, di kampus kita diselenggarakanlah Gebyar Seni dan Budaya yang dimotori oleh UKM Seni dan Budaya. Berbagai macam kesenian dan kebudayaan, yang diwujudkan berupa pameran, pertunjukan, maupun lomba, ditampilkan untuk menambah kasanah seni dan budaya mahasiswa UK Petra.

Acara Gebyar Seni dan Budaya (GSB) ini diawali dengan pembukaan di atrium Petra Tower dan resmi dibuka oleh rektor Prof. Dr. Aris Pongtuluran. Dalam GSB kali ini banyak kesenian daerah yang ditonjolkan. Menurut Denny Kurniawan, Ketua Umum GSB sebenarnya kegiatan-kegiatan mahasiswa UK Petra banyak sekali yang bersentuhan dengan kebudayaan tradisional. Tetapi selama ini belum banyak yang tahu.. Sebagai acara pembuka ditampilkan Reog Ponorogo Gembong Simo Yudho dari Surabaya.

Selain itu acara yang berlangsung selama satu minggu penuh ini, juga mengadakan pemutaran film gratis. Pemutaran film gratis ini diselenggarakan oleh UKM Apresiasi Film di ruang audio visual, tower UK Petra Lt. 5. Film-film yang diputar pun cukup berbobot. Yaitu Shakespeare in Love yang diputar di

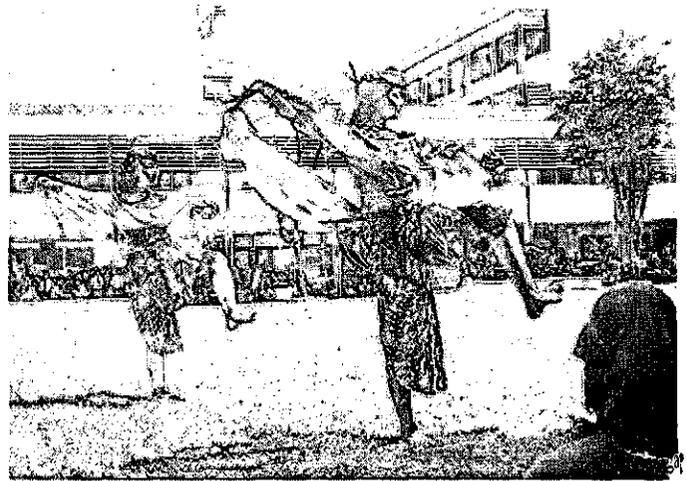
hari pertama, Heaven and Earth, The Mask of Zorro dan yang terakhir adalah film Life is Beautiful. Tiga dari empat film ini adalah peraih penghargaan Academy Awards. Bahkan film yang disebut pertama, adalah film terbaik Academy Awards untuk tahun 1999 ini. Untuk meramaikan pemutaran film ini, diadakan pula lomba menulis resensi film Shakespeare in Love, yang memperebutkan hadiah pertama sebesar seratus ribu rupiah.

Tak ketinggalan pula, UKM Lukis menyelenggarakan pameran Seni Rupa. Pameran yang bertempat di gedung P Lt. 1 ini menampilkan karya-karya mahasiswa UK Petra dan seniman perupa antar kota, M. Thalib Piasodjo. Selain karya-karya seni yang dipamerkan, juga dibuka kesempatan bagi mahasiswa UK Petra untuk membelinya. Juga diselenggarakan

lomba lukis untuk mahasiswa UKP yang langsung dinilai oleh seniman M. Thalib Piasodjo. Dalam pameran lukisan ini juga dikutkan pameran filateli hasil karya dari UKM Filateli. Serta diadakan pula Bazar Seni yang menampilkan aneka kerajinan tangan dan batik di Entrance Hall Lt. 1.

Tak lengkap rasanya bila dalam Gebyar

*Bersambung ke hal. 12 kolom 1*



## PENGUMUMAN REDAKSI

1. Dwi Pekan terbit pada Senin kedua dan Senin keempat setiap bulannya.
2. Sivitas yang ingin menyampaikan informasi harap memperhatikan deadline naskah.
3. Deadline naskah untuk Dwi Pekan edisi 13 Juni adalah Sabtu, 5 Juni 1999.
4. Rubrik Forum Komunikasi Tertulis mempunyai sifat umpan-balik. Bila ada keluhan, kritikan, pertanyaan, dan saran mengenai UK Petra dan pelayanannya, silakan mempergunakan rubrik ini. Unit yang menjadi obyek keluhan dan sebagainya, diharapkan

5. juga memberikan respon sebagai komitmen peduli.
5. Setiap tulisan yang dikirimkan redaksi menjadi milik redaksi dan hak pemuatan ada pada redaksi.
6. Redaksi berhak menyunting isi naskah tanpa mengubah isi.
7. Setiap tulisan yang dikirimkan kepada redaksi harus disertai dengan fotokopi KTM atau KTP.
8. Sivitas yang mengirimkan naskah melalui e-mail, harus menyertakan nama lengkap dan NRP atau NIP.
9. Khusus untuk pengirim tulisan Agenda

dan Seputar Kampus harap menyertakan nama terang dan nomor telepon yang dapat dihubungi untuk konfirmasi kegiatan.

10. Naskah dapat diserahkan ke ruang Redaksi di kantor HUMAS (sebelah Bank Niaga), lantai 1 Entrance Hall setiap hari mulai pukul 07.00-16.00. Naskah dapat berupa ketikan, tulisan tangan atau lebih disukai dalam disket.
11. Naskah juga dapat dikirimkan ke info@petra.ac.id

**REDAKSI**



## DEWAN PIMPINAN PUSAT KELUARGA ALUMNI UNIVERSITAS KRISTEN PETRA (DPP - KANITRA)

# PERLU ADANYA JARINGAN YANG SOLID ANTAR ALUMNI

**H**ari-hari menjelang Pemilu yang semakin dekat membuat masyarakat terutama etnis Tionghoa merasa cemas. Kekhawatiran akan kemungkinan terjadinya kerusuhan dan kekacauan selama hari-hari itu menyebabkan warga merasa harus melakukan tindakan antisipatif dari persiapan-persiapan keamanan di rumah bahkan keputusan untuk eksodus ke luar negeri. Hal ini merupakan sesuatu yang wajar dan manusiawi karena tentu saja setiap individu mempunyai pertimbangan sendiri-sendiri.

Timoticin Kwanda, B.Sc., MRP menghimbau kepada alumni Universitas Kristen Petra yang mayoritas adalah etnis Tionghoa untuk tidak perlu merasa cemas secara berlebihan sehubungan dengan Pemilu 1999 ini karena secara pribadi beliau yakin bahwa Pemilu 1999 akan berlangsung dengan lancar berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Pemilu 1999 merupakan satu-satunya jalan bagi Indonesia menuju ke pemerintahan yang demokratis. Oleh karena itu, semua partai-partai bermasa besar seperti PDI Perjuangan, PKB, PAN mempunyai

komitmen untuk mensukseskan Pemilu. Ketiga partai ini telah mengeluarkan komitmen bersama yang intinya mendukung Pemilu yang jujur dan luber.

2. Pada saat ini, Pemilu di Indonesia sedang menjadi sorotan dunia sehingga banyak organisasi-organisasi internasional yang mengirim pengamat-pengamat untuk melakukan pengawasan terhadap Pemilu.
3. Jumlah partai yang banyak (total 48 partai) bukan berarti akan ada 48 partai yang benar-benar berkampanye, tetapi beberapa partai yang memiliki massa besar. Partai-partai yang memiliki massa itu juga, oleh Panitia Pemilihan Daerah telah disusun jadwal kampanye sedemikian rupa sehingga partai-partai yang mempunyai potensi untuk konflik tidak akan dipertemukan dalam hari/lokasi yang sama.
4. Potensi kerusuhan di kota-kota besar seperti di Jakarta dan Surabaya akan lebih kecil daripada di daerah karena kader dan massa partai lebih bisa memahami perbedaan pendapat.
5. Sebelum masa kampanye yang dimulai tanggal 19 Mei, sebenarnya partai-partai

telah melakukan kampanye berupa deklarasi, temu kader dan selama ini kampanye-kampanye tersebut relatif aman. Sedangkan pada masa kampanye, kegiatan partai-partai lebih dikekang dengan peraturan-peraturan seperti bentuk kampanye, waktu, dan tempat kampanye. Misalnya di tempat-tempat yang rawan konflik hanya diperbolehkan bentuk kampanye dialogis dalam ruangan.

Dilihat dari pertimbangan-pertimbangan di atas, maka masalah kampanye relatif aman tetapi diharapkan agar diantara alumni sendiri harus proaktif. Ada baiknya juga alumni membentuk jaringan yang terorganisasi untuk mengelola informasi-informasi baik yang terkait dengan Pemilu maupun untuk kegiatan-kegiatan alumni yang lain di masa yang akan datang. Jaringan ini dapat dilakukan per angkatan atau per jurusan dengan koordinasi satu kontak person dari KANITRA dapat berfungsi sebagai pusat informasi bagi alumni. □

(juve)

## INFORMASI KERJA

1. PT Segoro Ecomulyo Textile membutuhkan lulusan S1 atau tinggal wisuda sebagai Marketing Export.
2. PT Chakraprima Citranusa membutuhkan S1 Teknik Elektro atau Teknik Mesin sebagai Sales Engineer.
3. Bank Internasional Indonesia (BII) membutuhkan lulusan S1 sebagai

Customer Service, Teller, dan Marketing Officer.

4. PT Astra International Tbk membutuhkan lulusan S1 Teknik Elektro arus lemah dan S1 Teknik Manajemen Industri di bidang Informatika Teknologi.
5. The Principal Canadian International School membutuhkan S1 Sastra Inggris

sebagai English Speaking Kindergarten/Preschool Teachers.

**Informasi lengkap hubungi  
Sekretariat KANITRA  
di 8494830-31 pesawat 1443**

Dewan Pimpinan Pusat Keluarga Alumni Universitas Kristen Petra Surabaya: Ketua Umum: Jan Christian Nelwan, Ir. Sekretaris Jendral: Yuda Endro Wicaksono, Ir. Wakil Sekretaris Jendral: Gideon Hadikusumo, Ir. M.Eng. Bendahara Umum: Timoticin Kwanda, B.Sc., MRP. Wakil Bendahara Umum: Irawati Sandjaja, Dra. Wakil Bendahara Umum: Christine Dewati Iguna, Ir. Ketua Bidang Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia: Benjamin Lumantarna, Ir. M.Eng., Dr. Prof. Anggota Bidang Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia: Anita Lie, Dr.; Connie Susilawati, Ir. M.Com. Prop.; Aditya Nugraha, ST. Ketua Bidang Komunikasi, Publikasi dan Kerjasama: Rosiana Adinegoro, Dra. Anggota Bidang Komunikasi, Publikasi dan Kerjasama: Harto Subroto Juwono, Ir.; Fadjar Mulladinata, ST., Jakob Iskandar, SS. Ketua Bidang Aksi dan Partisipasi: Daniel Rohi, ST. Anggota Bidang Aksi dan Partisipasi: Benny Poerbantano, Ir., MSP.; Andreas Roy, ST.; Roche Alimin, ST. Ketua Bidang Pengembangan Dunia Usaha: R. Sugito Imanudin, MBA Anggota Bidang Pengembangan Dunia Usaha: Huriyanto Koentjoro, Ir. M.Eng.; Hendra Prasetya, Ir., Agus Sani Priadi, Ir. Ketua Bidang Kesejahteraan Anggota: David Wianto, Ir. Anggota Bidang Kesejahteraan Anggota: Christina Rahardja, SE.; Klemens S. C., ST., dan Edy Suhartono, A.Md. Staf Sekretariat: Julia Veronika, Isak, Yoyo Kurniawan Sanjata.

### ALUMNI,

*ANDA punya rencana pindah?*

Informasikan alamat baru Anda dengan mengirimkan formulir di bawah ini ke sekretariat KANITRA:

NAMA: \_\_\_\_\_

PINDAH DARI: \_\_\_\_\_

TELP: \_\_\_\_\_

KE: \_\_\_\_\_

TELP: \_\_\_\_\_

## Kritik - A

sambungan dari hal. 4

nopang (baca: melayani) bangunan induknya. Nah... untuk mewujudkan ide rancangan itu malam ke dua aku tidak tidur lagi sebab aku harus menyelesaikan gambarnya."

"Lha... terus apa yang membuatmu mengumpat 'sial', Joko!"

"Lha... ini juga yang benar-benar sialan. Dosenku itu ternyata lebih kritis lagi. Dan ia mengeritik bahwa aku harus lebih kritis lagi. Makanya aku disuruh memperbaiki rancanganku."

"Kalau dosenmu kamu bilang lebih kritis dari kamu, mengapa pemikirannya yang kritis itu tidak ia utarakan?" tanya Pontak keheranan.

Kali ini Joko hanya diam mengatup mulut, mencibirkan bibirnya sambil mengangkat bahu dan membuka kedua telapak tangannya ke depan.

"Mungkinkah saluran untuk ia bersuara disumbat atau mungkin ia pernah bersuara tapi tidak pernah di dengar atau jangan-jangan ia penganut status quo?????" gumam Pontak dalam ketidakmengertiannya. □

## Forum Komunikasi Tertulis

sambungan dari hal. 2

7. Terbit lebih tebal....

OK THANK'S

Mudah-mudahan tabloidnya sukses

I Gusti Putu Yaktianuraga  
24495013

kampus lebih banyak.

Komentar : Tabloid kalau terbit sebulan sekali, terlalu lama.

Dra. Shienny Thio  
(dosen Manajemen Perhotelan)

### Sebulan Sekali Terlalu Lama

Isinya lebih variatif, tampilannya lebih bagus, banyak gambar dan warna, wawasan dan pengetahuan lebih banyak.

Sedangkan DP lebih banyak teksnya, informasi tentang pegawai dan seputar

### Lebih Menarik Untuk Dibaca

Tabloid lebih menarik untuk dibaca, dibandingkan dengan Dwi Pekan dan lebih menonjol.

Dedy (karyawan UK Petra)

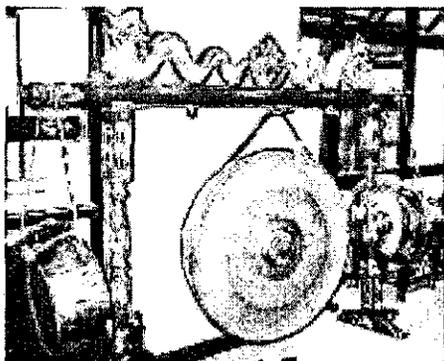


Mari kita ciptakan  
**kerukunan**  
dan  
**kesejahteraan**  
bersama

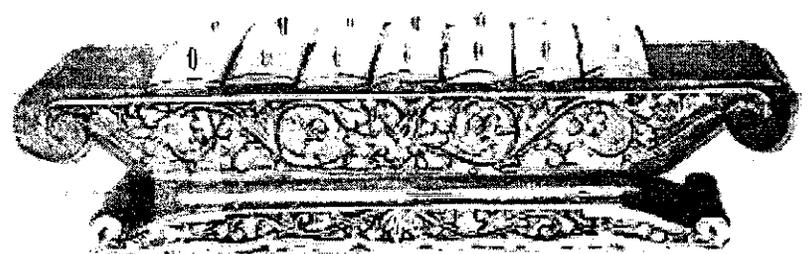
## Berbeda dalam Seni...

sambungan dari hal. 10

Seni dan Budaya ini, tidak menyertakan seni musik. Karena itu ditampilkanlah Festival Musik Nasrani. Festival yang bertempat di auditorium ini mendapat sambutan cukup hangat dari mahasiswa. Terlihat dari acara final yang menampilkan lima band, diikuti dengan seksama oleh para mahasiswa sampai acara ini habis. Dan lomba yang mempersiapkan total hadiah Rp.550.000,00 ini memunculkan Petruk Band dari SMU Kr. Petra 5 sebagai juara satu. Sedangkan wakil dari UK Petra berhasil menyabet juara ketiga, atas nama The Clouds. Satu hal lagi yang menarik adalah dipamerkannya peralatan musik Jawa, yaitu seperti bonang, kenong, gong dan lainnya di entrance hall. Istimewanya, kita tidak hanya dapat melihat dan me-



Gong Ageng



Saron Demung

ngetahui alat-alat musik yang sering digunakan untuk mengiringi pertunjukan wayang kulit tersebut. Kita dapat mencoba membunyikan dan bahkan memainkannya sesuai dengan petunjuk nada yang telah disediakan. Pameran alat musik tradisional karawitan dan gamelan ini merupakan hasil kerjasama UK Petra dengan SMK Negeri 9 Surabaya.

Acara puncak dari penyelenggaraan GSB ini adalah pementasan band, tari, drama dan paduan suara serta pertunjukan barongsay. Acara penutupan yang dimulai pk 13.30 ini benar-benar menunjukkan semaraknya Gebyar Seni dan Budaya. Auditorium yang cukup padat dengan mahasiswa, lampu panggung yang berkelip-kelip dan acara demi acara yang ditampilkan, cukup memuaskan para penon-

ton. Sajian pamungkas Barongsay yang menyedot perhatian penonton, menjadi acara terakhir sekaligus menutup segala rangkaian kegiatan GSB tahun ini.

Gebyar Seni dan Budaya 1999 memang telah berlalu. Acara yang berjalan di tengah-tengah hiruk pikuknya kampanye partai politik ini, memang memberikan kedamaian tersendiri. Namun hendaknya GSB ini tak sekedar menjadi hiburan dan gebyar semata. Atau seperti gebyar kembang api yang begitu terang dan indah, lalu hilang begitu saja. Tetapi semangat GSB yang menunjukkan bahwa perbedaan itu indah dan hendaknya kita hargai sebagai salah satu anugerah Tuhan, seperti yang tercemin dalam tema GSB: "Berbeda dalam Budaya, Bersatu dalam Seni." □ (103)